

**LKPP**

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SALINAN**KEPUTUSAN****KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH****REPUBLIK INDONESIA****NOMOR 100 TAHUN****TENTANG**

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2021**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan kegiatan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Inspektorat adalah unsur pengawas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan intern, perlu menyusun program kerja yang berisi tentang pelaksanaan kegiatan pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat selama setahun yang disebut Program Kerja

Pengawasan Tahunan yang perlu mendapat persetujuan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 898);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

12. Keputusan Inspektur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2021, yang merupakan panduan bagi Inspektorat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan internal di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari:

- a. Faktor Risiko Unit Organisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- b. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat LKPP Tahun 2021.

KEDUA : Faktor Risiko Unit Organisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2021
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

NOMOR : 100 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 April 2021

**FAKTOR RISIKO AUDIT
PENILAIAN 6 FAKTOR RISIKO PADA UNIT ORGANISASI ESELON II DI LINGKUNGAN LKPP**

No	Unit Organisasi	Pagu Anggaran Unit Organisasi (10%)		Pagu Anggaran terkait Pengadaan Barang dan Jasa (20%)		Jumlah Pegawai yang dimiliki Unit Organisasi (5%)		Ketaatan Penyelesaian Hasil Audit Eksternal (10%)		Kegiatan Strategis dan Prioritas Nasional (30%)		Jumlah Risiko Unit Organisasi (25%)		Profil Risiko Unit Organisasi	
1	Biro Perencanaan dan Keuangan	Rendah	2	Sangat Rendah	1	Tinggi	4	Sedang	3	Rendah	2	Sedang	3	Sedang	2,2
2	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Tinggi	4	Rendah	2	Rendah	2	Sedang	3	Sangat Tinggi	5	Rendah	2	Tinggi	3,2
3	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Sangat Tinggi	5	Sangat Tinggi	5	Sangat Tinggi	5	Sedang	3	Rendah	2	Sangat Tinggi	5	Tinggi	3,9
4	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Sedang	3	Sedang	3	Rendah	2	Sangat Rendah	1	Sangat rendah	1	Rendah	2	Rendah	1,9
5	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Rendah	2	Sangat Rendah	1	Rendah	2	Sangat Rendah	1	Sedang	3	Sangat Rendah	1	Rendah	1,7
6	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional	Rendah	2	Sangat Rendah	1	Rendah	2	Sangat Rendah	1	Sangat rendah	1	Rendah	2	Rendah	1,4
7	Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	Sedang	3	Rendah	2	Sedang	3	Sangat Rendah	1	Sangat Tinggi	5	Rendah	2	Sedang	2,9
8	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	Tinggi	4	Sedang	3	Tinggi	4	Sangat Tinggi	5	Sangat Tinggi	5	Sangat Tinggi	5	Sangat Tinggi	4,4
9	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Sangat Tinggi	5	Sangat Tinggi	5	Tinggi	4	Sangat Rendah	1	Sangat Tinggi	5	Sangat Rendah	1	Tinggi	3,5
10	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Sedang	3	Rendah	2	Rendah	2	Sangat Rendah	1	Sedang	3	Sangat Rendah	1	Sedang	2,0
11	Direktorat Sertifikasi Profesi	Sedang	3	Sangat Rendah	1	Sedang	3	Sangat Rendah	1	Sangat rendah	1	Rendah	2	Rendah	1,5
12	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat	Rendah	2	Sedang	3	Rendah	2	Sangat Rendah	1	Sangat rendah	1	Sangat Rendah	1	Rendah	1,5
13	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	Tinggi	4	Tinggi	4	Rendah	2	Sangat Rendah	1	Sangat rendah	1	Sangat Rendah	1	Rendah	1,9
14	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	Rendah	2	Sangat Rendah	1	Rendah	2	Sangat Rendah	1	Rendah	2	Rendah	2	Rendah	1,7
15	Pusdiklat Pengadaan Barang/Jasa	Sedang	3	Sangat Rendah	1	Sedang	3	Sangat Rendah	1	Sangat rendah	1	Sangat Rendah	1	Rendah	1,3
16	Inspektorat	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Rendah	2	Rendah	2	Rendah	2	Tinggi	4	Sedang	2,2

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

jdih.lkpp.go.id

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN INSPEKTORAT LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2021

NOMOR : 100 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 April 2021

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT LKPP TAHUN 2021

No	Kegiatan	Nama Kegiatan	Dasar Penugasan	Jumlah Orang per Kegiatan	Jumlah Hari Pengawasan per Kegiatan*	Waktu Pelaksanaan Pengawasan	Keluaran	
							Target	Bentuk
1	Audit							
A	Audit Kinerja	Probity Audit atas Pelaksanaan Kegiatan Rakornas PBJ*	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 2. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 3. Permen PANRB Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit APIP; 4. Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP; 5. Kepka LKPP Nomor 132 Tahun 2018 tentang Kendali Mutu Pengawasan Inspektorat LKPP.	6	18	Sep – Des	1	Laporan Hasil Probity Audit Atas Pelaksanaan Kegiatan Rakornas PBJ
		Audit Kinerja Atas Pengelolaan Tata Kelola UKPB di Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan*		6	18	Feb	1	Laporan Hasil Audit Kinerja atas Pengelolaan Tata Kelola UKBJ di Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
		Audit Kinerja Atas Pemeliharaan, Keindahan dan Keamanan Gedung (BUK-TURT dan PPK)*		6	20	Jun	1	Laporan Hasil Audit Kinerja Atas Pemeliharaan, Keindahan dan Keamanan Gedung (BUK- TURT dan PPK)
		Audit Kinerja Atas Seleksi Konsultan Regulation Impact Analysis (RIA)*		6	15	Mei	1	Laporan Hasil Audit Kinerja atas Seleksi Konsultan RIA
		Audit Kinerja Atas Tata Kelola terkait SPBE di LKPP*		6	18	Agt	1	Laporan Hasil Audit Kinerja Atas Tata Kelola terkait SPBE di LKPP
B	Audit dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Integritas Pegawai LKPP dengan Audit Dengan Tujuan Tertentu*	1. Permen PANRB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); 2. Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP; 3. Peraturan KPK Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi; 4. Perka LKPP Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di LKPP; 5. Permen PAN RB Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan	6	10	Jan - Des	5	Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Integritas Pegawai LKPP

No	Kegiatan	Nama Kegiatan	Dasar Penugasan	Jumlah Orang per Kegiatan	Jumlah Hari Pengawasan per Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Pengawasan	Keluaran	
							Target	Bentuk
2	Reviu							
		Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) LKPP*	PMK Nomor 94 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA KL dan Pengesahan DIPA	5	10	Mei dan Agt	2	Laporan Hasil: 1. Reviu Rencana Kerja Anggaran Pagu Indikatif LKPP Tahun Anggaran 2022; 2. Reviu Rencana Kerja Anggaran Pagu Alokasi LKPP Tahun Anggaran 2022
		Reviu atas Revisi DIPA Tahun Anggaran 2021*	PMK Nomor 94 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA KL dan Pengesahan DIPA PMK Nomor 206 Tahun 2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019	5	10	Okt	2	Laporan Hasil Reviu atas Revisi DIPA Tahun Anggaran 2021
		Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)*	KMK Nomor 332/KM.6/2016 tentang Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara oleh APIP	5	10	Sep	1	Laporan Hasil Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)
		Reviu Laporan Kinerja (LKj)*	Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP	5	10	Feb	1	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (LKj)
		Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ)*	Keppres Nomor 20 Tahun 2015 tentang Realisasi APBD/APBN	5	10	Jan, Apr, Jul, dan Okt	4	Laporan Hasil: 1. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) Triwulan IV Tahun 2020; 2. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) Triwulan I Tahun 2021; 3. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) Triwulan II Tahun 2021; dan 4. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) Triwulan III Tahun 2021
		Reviu Laporan Keuangan*	1) PMK No. 255 Tahun 2015 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan; 2) Kepka LKPP Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan di LKPP	5	15	Jan, Jul, dan Okt	3	Laporan Hasil: 1. Reviu Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020; 2. Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2021 ; dan 3. Reviu Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2021
		Reviu Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Pengelolaan PNPB*	1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak Atas Belanja Pemerintah Dan Penerimaan Negara Bukan Pajak; 2) Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP	5	10	Feb	1	Laporan Hasil Reviu Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Pengelolaan PNPB

No	Kegiatan	Nama Kegiatan	Dasar Penugasan	Jumlah Orang per Kegiatan	Jumlah Hari Pengawasan per Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Pengawasan	Keluaran	
							Target	Bentuk
3	Evaluasi							
		Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)*	1) Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman PMPRB; 2) Permen PANRB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	6	7	April-Mei	1	Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
		Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*	Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP	6	7	April-Mei	7	Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) atas 5 Unit Organisasi Eselon I, Pusdiklat dan Inspektorat
		Evaluasi atas Efektifitas Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP)*	Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2014 tentang <i>Standard Operating Procedures</i> di LKPP	5	7	Mei	1	Laporan Hasil Evaluasi atas Efektifitas Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP)
		Evaluasi atas Pelaksanaan Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) LKPP*	Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP	6	7	Mei	1	Laporan Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan SSCASN LKPP
		Evaluasi atas Penerimaan Hibah LKPP*	1. Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP 2. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	7	Mei	1	Laporan Hasil Evaluasi Atas Penerimaan Hibah LKPP
4	Pemantauan							
		Pemantauan atas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Organisasi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan*	Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP	3	5	Jul dan Des	3	Laporan Hasil Pemantauan atas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Organisasi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2021
		Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat*	Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP	3	5	Jul dan Des	2	Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Semester I dan Semester II Tahun 2021
		Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal*	Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP	3	5	Jan dan Jul	2	Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal Semester I dan Semester II Tahun 2021
		Pemantauan SP4N Lapor*	Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP	3	5	Jan dan Jul	2	Laporan Hasil Pemantauan SP4N Lapor Semester I dan Semester II

No	Kegiatan	Nama Kegiatan	Dasar Penugasan	Jumlah Orang per Kegiatan	Jumlah Hari Pengawasan per Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Pengawasan	Keluaran	
							Target	Bentuk
4	Pemantauan							
		Pemantauan atas Penanganan dan Pengelolaan Whistle Blowing System Internal, Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan*	Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP	3	5	Jan, Apr, Jul dan Okt	4	Laporan Hasil: 1. Pemantauan atas Penanganan dan Pengelolaan Whistle Blowing System Internal, Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan Triwulan IV Tahun 2020; 2. Pemantauan atas Penanganan dan Pengelolaan Whistle Blowing System Internal, Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan Triwulan I Tahun 2021; 3. Pemantauan atas Penanganan dan Pengelolaan Whistle Blowing System Internal, Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan Triwulan II Tahun 2021; dan 4. Pemantauan atas Penanganan dan Pengelolaan Whistle Blowing System Internal, Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan Triwulan III Tahun 2021
5	Kegiatan Pengawasan Lainnya							
A	Pembinaan SPIP	Pendampingan Pelaksanaan SPIP di LKPP*	1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP; 2. Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP; 3. Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SPIP di LKPP	4	5	Jan dan Agt	2	Laporan Hasil Pendampingan Pelaksanaan SPIP di LKPP Semester I dan Semester II
		Penilaian Maturitas SPIP/MRI LKPP*	1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP; 2. Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP; 3. Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SPIP di LKPP	4	5	Sep	1	Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP LKPP
B	Sosialisasi Pengawasan	Sosialisasi kepada Unit Organisasi di LKPP, tentang 1. Unit Pengendali Gratifikasi*; 2. SP4N Lapor*; 3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*	Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP	3	1	Feb, Apr, dan Jul	3	Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi: 1. Unit Pengendali Gratifikasi; 2. SP4N Lapor; 3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

No	Kegiatan	Nama Kegiatan	Dasar Penugasan	Jumlah Orang per Kegiatan	Jumlah Hari Pengawasan per Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Pengawasan	Keluaran	
							Target	Bentuk
5	Kegiatan Pengawasan Lainnya							
C	Pelaksanaan Penilaian Kapabilitas APIP	Penilaian Kapabilitas APIP*	1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP; 2. Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP	5	5	Sep	1	Laporan Hasil Kegiatan Penilaian Kapabilitas APIP
		Penyusunan Kebijakan Pengawasan Internal*	Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP	10	3	Jan - Des	5	Kebijakan Pengawasan Internal berupa Peraturan, Keputusan, Surat Edaran dan/atau SOP
		Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2020*	Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP	5	3	Jan	1	Laporan Hasil Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2020
		Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Pengawasan Internal*	Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP	13	1	Jan - Des	12	Laporan Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Pengawasan Internal
		Pengembangan Teknik Audit Berbasis Komputer*	Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP	5	5	Apr	1	Laporan Hasil Pengembangan TABK
D	Pendampingan	Pendampingan pada Direktorat Pengembangan Sistem Katalog terkait Program Prioritas Nasional*	Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP	3	7	April	1	Laporan Hasil Pendampingan pada Direktorat Pengembangan Sistem Katalog terkait program Prioritas Nasional
		Pendampingan pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik terkait program Prioritas Nasional*)	Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP	3	7	Jul	1	Laporan Hasil Pendampingan pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik terkait program Prioritas Nasional
		Pendampingan pada Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Penyusunan Pedoman Evaluasi Kinerja PBJ dan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja PBJ*	Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP	3	7	Nop	1	Laporan Hasil Pendampingan pada Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Penyusunan Pedoman Evaluasi Kinerja PBJ dan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja PBJ
		Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas*	1) Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman PMPRB; 2) Permen PANRB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	3	7	Aprl - Mei	1	Laporan Hasil Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
		Pendampingan Pelaksanaan PMPRB*	1) Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman PMPRB; 2) Permen PANRB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	6	7	Aprl - Mei	1	Laporan Hasil Pendampingan Pelaksanaan PMPRB

No	Kegiatan	Nama Kegiatan	Dasar Penugasan	Jumlah Orang per Kegiatan	Jumlah Hari Pengawasan per Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Pengawasan	Keluaran	
							Target	Bentuk
5	Kegiatan Pengawasan Lainnya							
		Pendampingan Unit Organisasi pada Pemeriksaan Pengawasan Eksternal*	Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP	5	15	Jan - April	1	Laporan Hasil Pendampingan Unit Organisasi pada Pemeriksaan Pengawasan Eksternal
		Pendampingan Pengawasan Kearsipan Internal*	Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP	4	7	Jul	1	Laporan Hasil Pendampingan Pengawasan Kearsipan Internal
E	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pegawai	Program Pelatihan Mandiri (PPM)*	Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP	13	1	Feb - Nop	10	Notulen PPM
		Pelaksanaan Diklat*	Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP	13	5	Jan - Des	1	Laporan Hasil Pelaksanaan Diklat
							92	

Keterangan:

*) Jumlah hari pengawasan dapat berubah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan pengawasan dengan persetujuan Inspektur

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO